

SKRIPSI

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA BAGIK POLAK KECAMATAN LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Diajukan Sebagai Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Oleh :

NURAINI

NIM. 2019B1B055

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PARTISIPASI MASYRAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA BAGIK POLAK KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh :

NURAINI

2019B1B055

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah mendapat persetujuan pada tanggal, 13 juni 2023

Menyetujui
Pembimbing

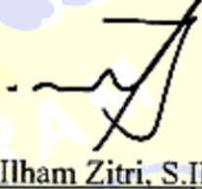
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Palahuddin, M.Ag.

NIDN: 0031127316

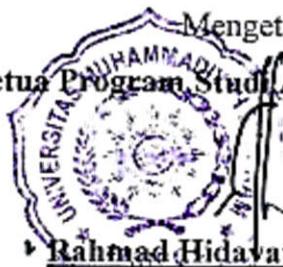


Ilham Zitri, S.IP, M.IP.

NIDN: 0817119102

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Negara



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.

NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PARTISIPASI MASYRAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA BAGIK POLAK
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Oleh:

NURAINI
2019B1B055

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 26 Juni 2023

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

Dr.H. Palahuddin, M.Ag
NIDN. 0031127316

()
Ketua

Ilham Zitri, S.IP., M.IP
NIDN. 0817119102

()
Anggota I

Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S
NIDN. 0031126484

()
Anggota II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Dr.H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam Naskah Skripsi ini tidak dapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH manapun di Perguruan Tinggi lainnya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (UU No.20 Tahun 2023, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 13 Juni 2023

Mahasiswa



NURAINI
2019B1B055



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAINI
NIM : 2019BIB055
Tempat/Tgl Lahir : Nanga Pede, 03 Agustus 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 081 238 008 418
Email : 2019BIB055nuraini@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan
Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten
Lombok Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 Juli 2023

Penulis



Nuraini
NIM. 2019BIB055

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

v

v



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAINI
NIM : 2019BIB055
Tempat/Tgl Lahir : Nanga Pedo, 03 Agustus 2000
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 2019BIB055nuraini@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan
Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten
Lombok Barat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Juni 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NURAINI
NIM. 2019BIB055

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

“ Percayalah Bahwa Capeknya Kita Hari Ini
Akan Membuah Hasil Yang Baik Suatu Saat Nanti
Nggak Ada Kesuksesan Yang Instan
Tanpa Melalui Proses
karena sukses adalah jumlah dari upaya kecil
yang diulang hari demi hari “



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya yang tercinta, Bapak Abdul Karim dan Ibu Siti Hasna, yang senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang, terima kasih telah memberikan segalanya terutama semangat apa yang saya impikan dapat tercapai.
2. Kakak saya Wahyuni, Kakak Yuyun, Kakak Ririn, Kakak Soni, Kakak Hanafi, Kakak Adhe serta juga Adik Saya Wulan dan Alif yang selalu memberikan doanya, dukungan, semangat serta nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Keluarga Besar IKAMMAT NTT-Mataram.
4. Untuk Orang Tua Di Tanah Rantau, Bapak Amir Amraen Putra dan Ibu, Bapak Sibawai dan Ibu Sumini, Bapak Rian dan Ibu Eka Intan, yang selalu memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada saya.
5. Untuk sahabat terbaikku, Susi, Neni, Try, Nida, Jumi dan Safiahni, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

UCAPAN TERIMA KASIH

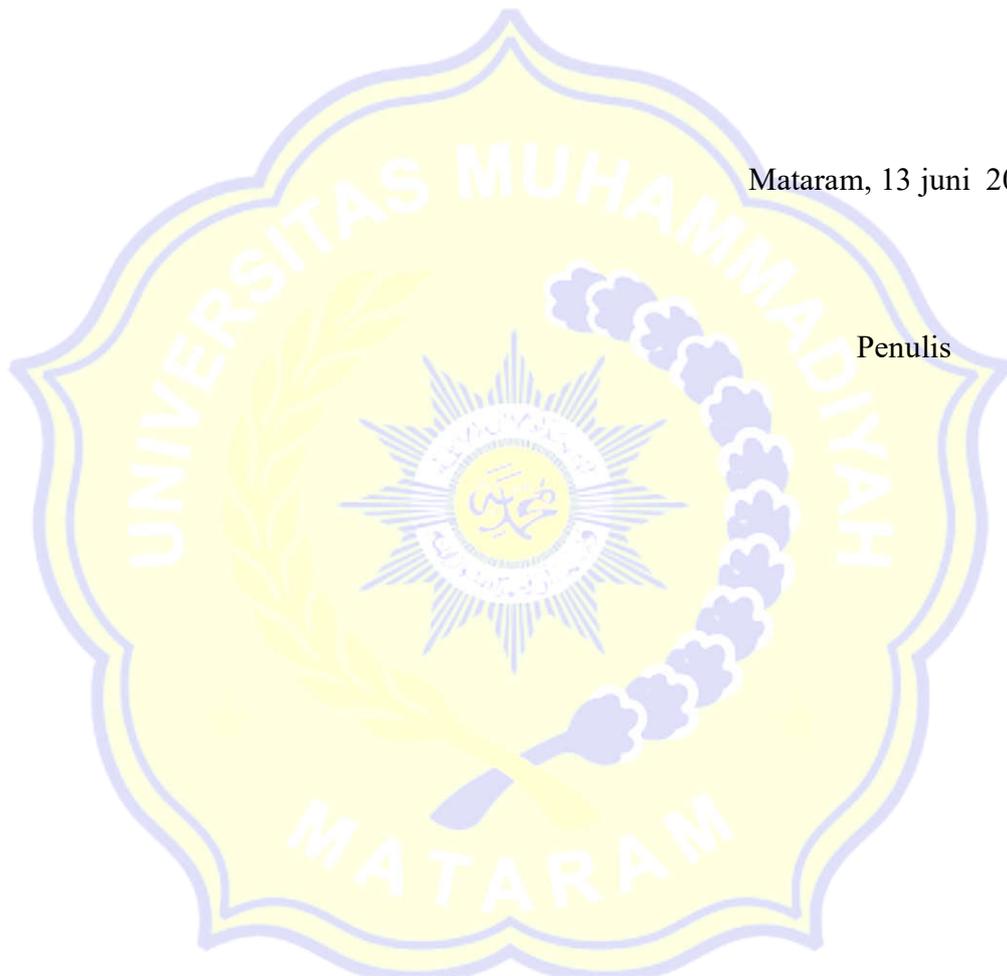
Dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, bimbingan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terimakasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada:

1. Bapak Dr.H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr, H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmat Hidayat, S.AP., M.AP. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr.H. Palahuddin, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ilham Zitri, S.IP., M.IP. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam Menyusun skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.
6. Orang Tua Saya Tercinta yang selalu memberikan saya Doa, Dukungan, sekaligus penyemangat dan motivasi hidup, sehingga dalam penulisan skripsi ini, bisa diselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman saya, yang selalu memberikan dukungan dukungan dan semangat, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Para Dosen yang tentunya tidak dapat satu-persatu penulis sebutkan yang membagikan pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Untuk Orang Tua Di Tanah Rantau, Bapak Amir Amraen Putra dan Ibu, Bapak Sibawai dan Ibu Sumini, Bapak Rian dan Ibu Eka Intan, yang selalu memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada saya.

Mataram, 13 juni 2023

Penulis



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Proposal yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ” dapat di selesaikan. Proposal ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.



Mataram, 13 juni 2023

Penulis

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA BAGIK POLAK KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dr. H. Pallahuddin¹, Ilham Zitri², Nuraini³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat sangat menentukan sebuah perencanaan atau kegiatan-kegiatan yang ada di desa, keberhasilan suatu kegiatan tanpa ada partisipasi masyarakat tidak mungkin berjalan sesuai harapan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan, supaya kegiatan berjalan sesuai harapan dalam mencapai tujuan bersama. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam mendorong cepatnya pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi dalam pembangunan desa di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Peran masyarakat dalam pembangunan yaitu sebagai objek dan subjek tetapi masyarakat menginginkan harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yang di gunakan yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Penulis menggunakan data sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 15 orang responden

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam proses pembangunan di lihat dari beberapa tahap pembangunan yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan memberikan bantuan berupa gagasan, materi, dan tenaga. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, krena menjadi faktor pendukung dalam pembangunan desa.

Kata kunci: Analisis; Partisipasi; Masyarakat; Pembangunan

ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF THE VILLAGE OF BAGIK POLAK LABUAPI SUB-DISTRICT WEST LOMBOK REGENCY

Dr. H. Palahuddin¹, Ilham Zitri², Nuraini³

**Public Administration Study Program, Faculty Of Social And Political Sciences,
Muhammadiyah University Of Mataram**

ABSTRACT

Community engagement plays a crucial role in determining the success of plans and activities within a village. Without active community participation, it is unlikely that activities will unfold as intended, hindering the achievement of shared objectives. Community involvement is essential in the development process to ensure that activities align with desired outcomes. The focus of this study is to explore community participation in the planning, implementation, utilization, and evaluation processes of village development in Bagik Polak Village, Labuapi District, West Lombok Regency. While the community is currently seen as both a recipient and contributor in development, there is a growing desire for the community to take on a more prominent role as the main driver of development. The study employed a descriptive qualitative research methodology, incorporating observation, interviews, and documentation analysis. The author utilized purposive sampling to select a sample of 15 respondents. The findings reveal that community participation exists in Bagik Polak Village, Labuapi District, West Lombok Regency, evident across various stages of development such as planning, implementation, utilization, and evaluation. The people of Bagik Polak Village, Labuapi District, West Lombok Regency actively contribute their ideas, resources, and labor to support development initiatives. Consequently, community participation is of utmost importance in the advancement of Bagik Polak Village, Labuapi District, West Lombok Regency, serving as a key facilitator in village development.

Keywords: Analysis; Participation; Public; Development

MENGESAHKAN

**SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM**

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



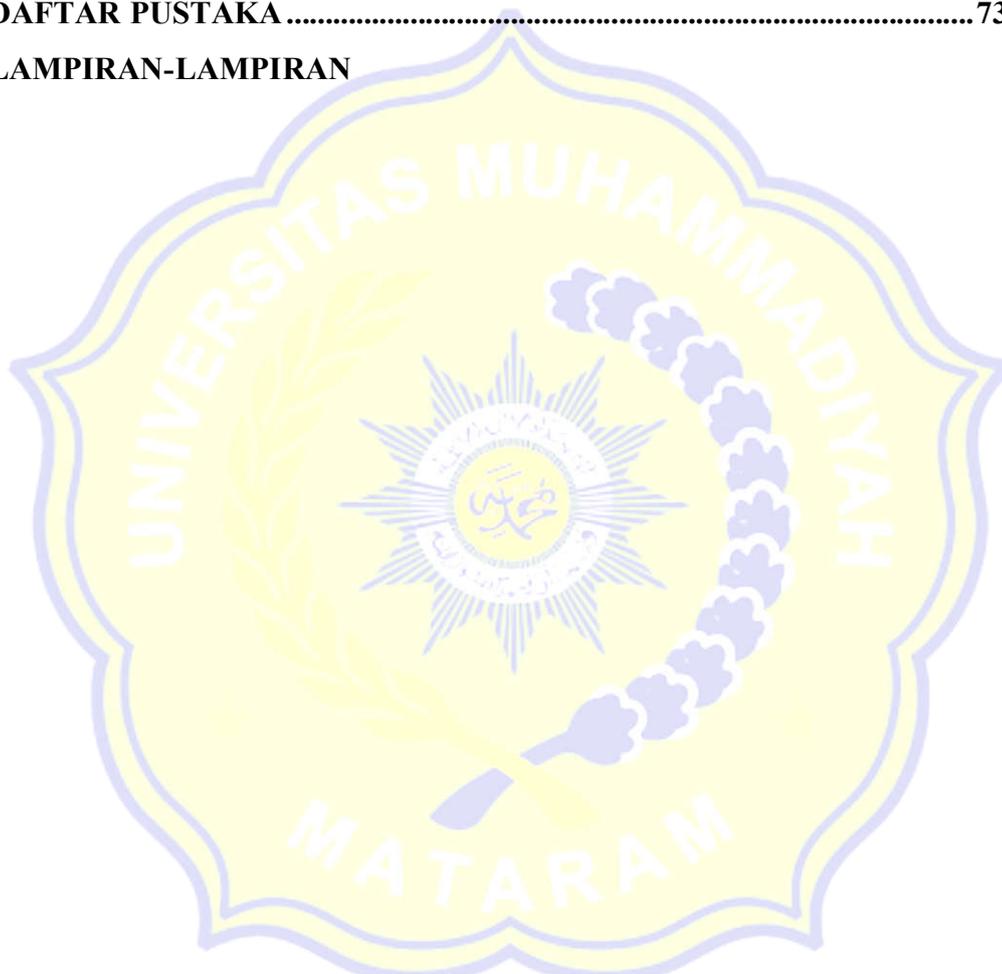
DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teori	13
2.2.1 Partisipasi Masyarakat	13
2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi	20
2.2.3 Manfaat Partisipasi	23
2.2.4 Definisi Pembangunan	23
2.2.5 Definisi Desa	25

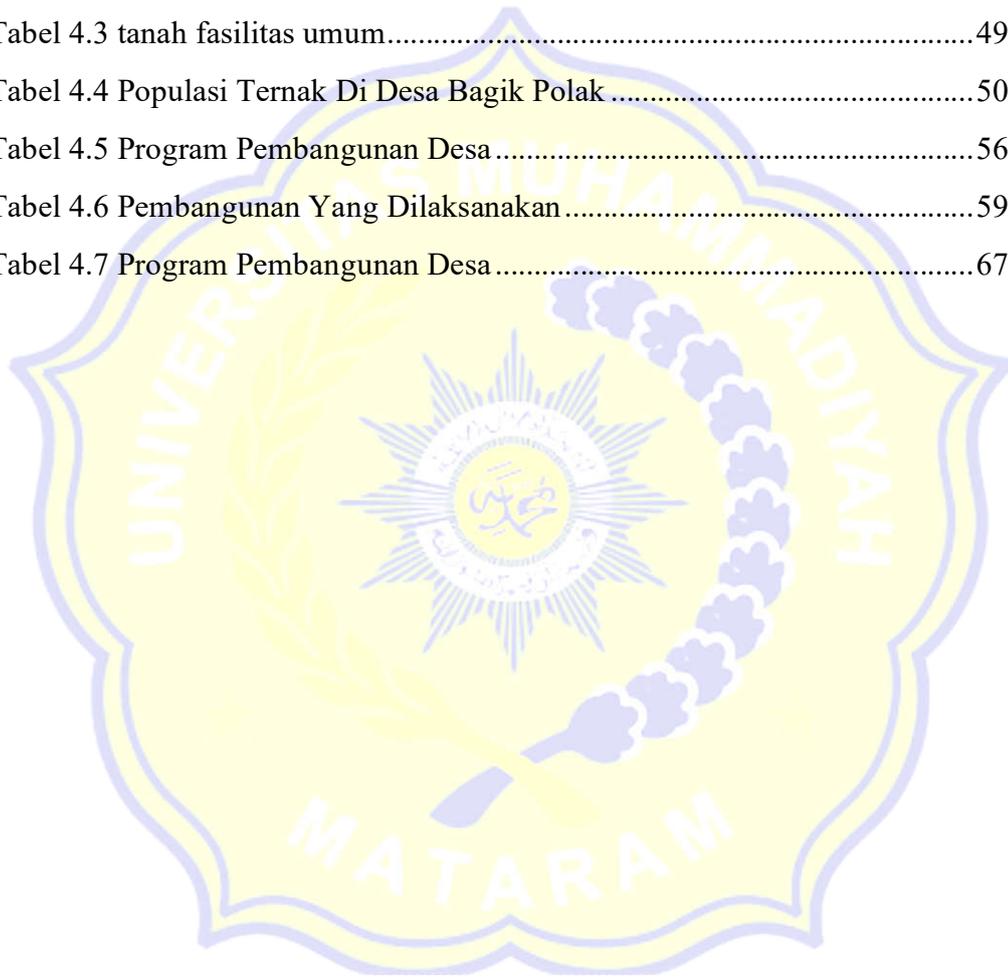
2.2.6	Definisi Pembangunan Desa	27
2.2.7	Patisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa	28
2.3	Kerangka Berpikir	31
2.4	Definisi Konseptual	32
2.4.1	partisipasi masyarakat.....	32
2.4.2	Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	32
2.4.3	Manfaat Partisipasi	33
2.4.4	Definisi Pembangunan.....	33
2.4.5	Definisi Desa	33
2.4.6	Definisi Pembangunan Desa	34
2.4.7	Patisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa	34
2.5	Definisi Operasional	34
BAB III	METODE PENELITIAN	35
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Lokasi Penelitian.....	36
3.3	Sumber Data.....	36
3.3.1	Data Primer	36
3.3.2	Data Skunder.....	37
3.4	Teknik Penentuan Responden	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1	Teknik Observasi	38
3.5.2	Teknik Wawancara	39
3.5.3	Teknik Dokumentasi.....	39
3.6	Teknik Analisis Data	39
3.6.1	Reduksi Data	40
3.6.2	Penyajian Data	40
3.6.3	Penarikan Kesimpulan.....	41
3.7	Validasi Data	41
3.8	Uji Kredibilitas	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	46
4.1.1	Profil Desa Bagik Polak.....	46

4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.....	55
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2.2 Defenisi Oprasional	34
Table 2.3 Daftar Nama informan	37
Table 4.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	46
Table 4.2 prasarana Pendidikan formal.....	47
Tabel 4.3 tanah fasilitas umum.....	49
Tabel 4.4 Populasi Ternak Di Desa Bagik Polak	50
Tabel 4.5 Program Pembangunan Desa	56
Tabel 4.6 Pembangunan Yang Dilaksanakan.....	59
Tabel 4.7 Program Pembangunan Desa	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama ini desa di Indonesia masih merupakan mata rantai terlemah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dari berbagai sumber dan kejadian yang ada dilapangan dimana desa dicirikan antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat, rendahnya produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan, lemahnya akses masyarakat dalam pembuatan keputusan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, desa dalam perkembangannya mengalami keterbatasan dan keterlambatan, sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan dan perkembangan kota. Rahman, Khairul (2016)

Sejak pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan Revormasi muncul Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur secara gamblang tentang pemerintah daerah (perda), di mana pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pemerintah untuk mengatur daerahnya sendiri dan masyarakatnya. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah pemerintah daerah diminta untuk menata Kembali aktifitas-aktifitas terdahulu dengan tampilan yang baru untuk melaksanakan pelayanan Negara dan Pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Provinsi NTB adalah kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan

masyarakat dan urusan pemerintah, sesuai peraturan Perundang-undangan, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 tercantum dalam pembukaan UUD 1945 “untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Akan tercapai jika di dorong dengan sumber daya manusia yang bermutu, sehingga menunjang pembangunan di tingkat lokal maupun nasional, Arthur T.Lomboh(2015).

Pembangunan nasional akan berhasil bila terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kesehatan dan pendidikan tinggi, supaya memungkinkan untuk meningkatkan mutu kehidupan kenegaraan, dan di dorong dengan penyelenggaraan pemerintah serta koordinasi masyarakat yang secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah mendapatkan wewenang besar dalam mengurus sumber keuangan untuk mendorong proses pembangunan nasional. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar pada perencanaan pembangunan daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah selama ini cenderung seragam dan bervariasi tergantung potensi dan permasalahan utama yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah adalah pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah. Perubahan pada dasarnya menyangkut hal pokok yaitu; pemerintah daerah mendapat wewenang yang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan, Arthur T.lomboh (2015).

Taliziduhu (2011) berpendapat bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang artinya sangat strategis, sehingga pembangunan desa adalah tulang punggung ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu dalam berbagai kegiatan sangat penting adanya partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan desa.

Rogers (2011:3) mengatakan bahwa pembangunan adalah perubahan yang menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan upaya masyarakat yang terus-menerus dilakukan bertujuan menepatkan masyarakat pada posisi dan perannya secara wajar sebagai subjek dan objek.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan desa, maka segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena masyarakat yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam membangun wilayahnya.

Pahbudi (2012) berpendapat bahwa untuk mengubah desa, membutuhkan perspektif baru yaitu; padangan baru yang tidak menempatkan desa sebagai objek melainkan subjek untuk proses yang hendak dibangun. Agar posisi desa lebih maju dan lebih kreatif, diperlukan kepedulian masyarakat supaya bisa berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan desa.

Partisipasi adalah keterlibatan pikiran atau mental, emosi dan perasaan seseorang dalam situasi kelompok agar mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan serta bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. (Keith Davis 1962). Menurut pemahaman secara umum, partisipasi masyarakat adalah akses

masyarakat dalam mengambil keputusan, kontribusi terhadap jalannya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Undang- Undang No.06 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 butir 5 yaitu “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 pada pasal 1 butir 2 mengatakan pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu prangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Dalam pembangunan desa membutuhkan perencanaan yang melibatkan semua masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi, bertujuan mencapai kondisi yang di inginkan serta dalam proses dan tujuannya melibatkan rakyat dan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan masyarakat. Diprioritaskan pada keterlibatan masyarakat disemua tahapan dan proses seperti dalam musyawara perencanaan pembangunan (Musrembang).

Desa Bagik Polak adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Desa Bagik Polak adalah salah satu dari 12 desa yang berada di Kecamatan Labuapi. Desa Bagik Polak memiliki 7 Dusun, diantaranya adalah Dusun Karang Bucu Daye, Dusun Karang Bucu Lauq, Dusun Karang Bucu Bat, Dusun Rerot, Dusun Karang Kebon Timur, Dusun Karang Kebon Bat, dan Dusun Enjak. Desa ini memiliki banyak penduduknya yang Sebagian besar bersuku sasak darah Lombok. Jumlah penduduk Desa Bagik Polak sebanyak 4.727 jiwa, Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani. Untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan di desa, masyarakat Desa Bagik Polak khususnya secara struktur sudah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan akan tetapi keterlibatan mereka masih kurang.

Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Musrembang adalah fokus program yang dijalankan oleh Lembaga pemerintah dalam pembangunan desa, bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Musrembang akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun diluar Desa. Adanya kebijakan pemerintah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang), semakin menuntut setiap Lembaga pemerintah Desa untuk berperan atau berpartisipasi dalam (Musrembang) serta Lembaga baik sekretaris dan Kepala

Dinas BPD, yang menjadi momentum pertemuan antara ide pikiran atau usulan para stakeholder yaitu masyarakat.

Masyarakat harus berpartisipasi dalam Musrembang yang diadakan oleh pemerintah Desa, Sehingga masyarakat ikut dalam pembangunan Desa. Ada tiga alasan penting yang menegaskan masyarakat untuk berpartisipasi, sebagai berikut : pertama, Partisipasi masyarakat adalah suatu alat untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, kondisi, setempat. Sehingga tanpa adanya ini program pembangunan tidak akan berjalan sesuai harapan. Kedua, Masyarakat akan percaya dengan program pembangunan jika merasa terlibat dalam proses perencanaan dan persiapan, karena masyarakat akan mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa hak demokrasi jika masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri, yaitu masyarakat mempunyai hak untuk menentukan jenis pembangunan dilaksanakan yang sesuai untuk desanya. Yang artinya masyarakat harus ikut aktif dalam kegiatan pembangunan, sedangkan Lembaga pemerintah berkewajiban memberikan arahan, bimbingan.

Dampak buruk bila pembangunan tanpa partisipasi pada masyarakat di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat: Pertama, Pemerintah desa kekurangan petunjuk tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kedua, Investasi yang ditanamkan di Desa tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan masyarakat. Ketiga, Sumber daya masyarakat yang potensial dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat tidak tertangkap. Keempat, Standar untuk merancang prasarana dan pelayanan yang tidak tepat.

Kelima, Fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

Noverman Djuadi (2014:51) Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial dalam mendukung kegiatan pembangunan yang digerakan oleh pemerintah, tetapi masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, tugas penting manajemen pembangunan dalam menggerakkan, membimbing dan menciptakan iklim dalam mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan dan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran disebabkan kurang partisipasi masyarakat. Penyebabnya antara lain: Pembangunan hanya menguntungkan golongan kecil., Pembangunan yang dimaksud kurang dipahami masyarakat, Pembangunan yang dimaksud kurang dipahami masyarakat mulai dari cara pelaksanaannya tidak di mengerti oleh masyarakat, Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal sehingga dapat menghambat pembangunan desa. Untuk mendorong motivasi dalam partisipasi masyarakat adalah pemerintah desa harus bersinergi dalam merencanakan program agar masyarakat desa khususnya Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bisa terealisasi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang sehingga peningkatan dalam pembangunan masih belum berjalan dengan baik dalam segi partisipasi masyarakat didesa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil Penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan bagi peneliti, pemerintah Desa Bagik Polak, serta Masyarakat di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terkait partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa .

1.4.2 Manfaat praktis

1. Masyarakat menjadi tahu pentingnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.
2. Masyarakat bisa memahami terkait partisipasi atau perannya dalam pembangunan desa.
3. Masyarakat dapat termotivasi ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai sebuah penelitian yang baru, penelitian ini dilaksanakan dengan merujuk dan mempertimbangkan temuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam konteks yang sama, yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Temuan-temuan tersebut menjadi titik perbandingan dan panduan bagi peneliti. Berikut ini adalah beberapa temuan terdahulu yang telah kami rangkum.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil
1.	Arianto (2011)	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kualitatif	Partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan di lembaga dan proses pemerintahan. Di Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, partisipasi warga telah mengubah persepsi partisipasi dari sekadar

				kepedulian terhadap kelompok yang kurang diuntungkan atau tersisi.
2.	Hendryk (2013)	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa sungai keledang kecamatan samarinda seberang kota samarinda.	Kualitatif	Dalam penelitian ini, terungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non-fisik telah menunjukkan tingkat keaktifan yang memadai. Fenomena ini dapat diamati melalui keterlibatan aktif masyarakat secara menyeluruh dalam proses pembangunan desa.
3.	Novita Lenak, Joyce J. Rares dan Gustaf Tampi (2015)	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa	Kualitatif	Optimalisasi evaluasi kegiatan melalui rapat desa yang diadakan masih belum tercapai, karena tingkat antusiasme masyarakat dalam mengikuti rapat desa masih terbatas. Namun, di sisi lain, masyarakat menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi saat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

4.	Nurwanda (2016)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Kasus Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)	Kualitatif	Pada keseluruhan aspek, partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik telah dilaksanakan dengan baik.
5.	Sarah Nurmalia Putri (2017)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)	Kuantitatif	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, dapat dilihat dari empat bentuk partisipasi yang terdiri dari pemberian ide/gagasan, sumbangan tenaga, sumbangan material, dan sumbangan dana. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut, antara lain kesadaran/kemauan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan.

6.	Vina (2017)	Peran Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Studi Pada Pembangunan Irigasi Di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu	Kuantitatif	Menurut penelitian ini, pembangunan desa di Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, tidak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.
7.	Handayani,Sri (2017)	Partisipasi Masyarakat, Penyusunan Anggaran Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Patikraja Banyuman	Kuantitatif	Peran aktif masyarakat sangat penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) guna meningkatkan efektivitas program-program yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sesuai dengan aspirasi Masyarakat Patikraja.
8.	Febri Nur (2018)	Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta	Kuantitatif	Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam proses

				pembangunan infrastruktur..
9.	Akbar, Suprpto, Surat (2018)	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo	Kuantitatif	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan di Desa Jatimulya, Kabupaten Boalemo.
10.	Yuni Kurniawati (2019)	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Mulyorejo Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara	Kuantitatif	Dalam penelitian ini, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara partisipasi masyarakat dan pembangunan desa.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

2.2 kajian Teori

2.2.1 Partisipasi Masyarakat

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilisasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Desa. (Zitri Ilham dkk, 2015:72)

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan (Mustamin, Hidayat R, dkk, 2020:3-4)

(Ratnatmulyani ddk, 2018:155) mengatakan bahwa partisipasi ialah tingkat keterlibatan individu atau kelompok sebagai anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk aktif terlibat dalam kehidupan politik yang memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat diamati melalui keterlibatan mereka dalam menentukan strategi, arah, dan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan yang ada..

Menurut Aprillia Theresia (2015:198), partisipasi merupakan keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam seluruh proses kegiatan yang terkait. Hal ini meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemanfaatan hasil dari kegiatan yang telah dicapai.

Ditinjau dari segi etimologi, kata "partisipasi" mengimplikasikan keterlibatan emosi dan mental individu terhadap pencapaian tujuan serta tanggung jawab yang berhubungan dengannya. Dalam pengertian ini, partisipasi melibatkan dimensi pemikiran yang mencakup keterlibatan emosi dan mental. Sebenarnya, partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau

sekelompok orang dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu tindakan, serta ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakat. Partisipasi tersebut berlaku dalam beragam aspek fisik dan mental, serta memiliki peran sebagai penentu kebijakan. [id.m.wikipedia.org /wiki / Partisipasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partisipasi). (Diakses tgl. 26 juni 2019).

Menurut Ginandjar Kartasmita (1977:153), masyarakat ialah sekelompok manusia yang memiliki kebebasan dan eksistensi yang langgeng, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan, serta memiliki hubungan yang saling terjalin antara anggotanya. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan, di mana pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada investasi langsung, tetapi lebih penting dan signifikan melalui kebijakan pembangunan yang mendorong terjadinya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pembangunan merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan tercermin dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Hak asasi warga negara dalam bentuk keikutsertaan masyarakat meliputi berbagai tahapan, mulai dari pemberitahuan informasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, konsultasi, hingga menyampaikan pendapat dan interaksi. Semua ini dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, sebagaimana yang

termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD 1945..
<http://m.detik.com/news/pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat>.(diakses tanggal 26 juni 2019).

Kehadiran individu dalam masyarakat memiliki makna yang nyata, di mana individu dapat mengungkapkan identitasnya sendiri dan berfungsi sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat akan terwujud jika ada stimulus dan dorongan yang memotivasi. Mendorong partisipasi masyarakat berarti memberikan motivasi kepada mereka untuk aktif berpartisipasi. Seseorang atau sekelompok orang akan bersedia melakukan sesuatu jika tindakan tersebut memberikan manfaat baik bagi individu maupun kelompoknya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki. Partisipasi masyarakat adalah “keterlibatan seseorang atau sekelompok orang atau anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam program pembangunan, partisipasi masyarakat adalah bentuk dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat”.

Menurut Sanof (Indrawijaya dkk, 2016:62), terdapat tiga aspek yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu: 1) Melibatkan masyarakat dan merancang proses pengambilan keputusan yang melibatkan mereka. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka dapat menerima

keputusan yang diambil dan menggunakan sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi masalah tertentu. 2) Meningkatkan rasa kebersamaan dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan dengan tujuan mencapai hasil pembangunan bersama. 3) Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan keputusan yang dihasilkan, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan perlu melibatkan dialog dengan masyarakat. Adalah penting untuk melakukan analisis yang mendalam dan cermat terhadap program yang direncanakan, termasuk situasi sosial, budaya, dan kondisi alam di wilayah setempat. Hal ini bertujuan agar program-program tersebut benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta memberikan solusi yang sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan yang ada. Teori peran aktif partisipasi masyarakat menurut Theresia et.al (2015:198) empat tahapan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan (perencanaan)

Dalam kegiatan pembangunan, sering kali masyarakat hanya sebagai objek pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keputusan tersebut cenderung lebih mengutamakan kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ditanamkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pembukaan forum-forum yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program-program pembangunan di wilayah mereka. Dengan adanya partisipasi tersebut, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan lebih mencerminkan keinginan serta aspirasi mereka.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat tentu tidak hanya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan akan tetapi salah satu hal penting dalam setiap keputusan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi satu keputusan bersama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan secara bersama pula (Jafar Ulfatul A, dkk, 2021:9)

Seringkali, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diartikan sebagai keterlibatan sukarela masyarakat yang lebih banyak terdiri dari individu atau kelompok yang

ekonominya lebih rendah, dalam menyumbangkan tenaganya. Di sisi lain, tingkatan di atasnya yang umumnya terdiri dari individu atau kelompok yang lebih kaya, cenderung lebih banyak mendapatkan manfaat dan hasil dari pembangunan tanpa diwajibkan untuk memberikan sumbangan secara proporsional. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan upaya untuk meratakan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan berbagai bentuk pengorbanan lainnya, sehingga sebanding dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat terkait. Selain itu, sering kali terlupakan bahwa partisipasi masyarakat juga penting dalam pemeliharaan program-program pembangunan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan program khusus yang mengatur partisipasi masyarakat dalam rangka memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka panjang tanpa mengalami penurunan kualitasnya.

3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan

Pemantauan dan evaluasi program serta program pembangunan memiliki peran yang penting tidak hanya dalam mencapai tujuan yang diharapkan, tetapi juga dalam mendapatkan umpan balik mengenai masalah-masalah dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bertujuan

untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan kegiatan serta perilaku pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan, serta untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi.

Pemanfaatan hasil pembangunan oleh masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, pemerataan hasil pembangunan menjadi tujuan utama yang perlu dicapai. Selain itu, pemanfaatan hasil pembangunan juga dapat merangsang kesukarelaan dan motivasi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Namun, disayangkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan pengelola pembangunan secara umum. Terkadang, mereka menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan, manfaatnya secara otomatis akan dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Namun, kenyataannya masyarakat sasaran seringkali tidak

sepenuhnya memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan indikator dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa..

2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi melibatkan keterlibatan mental, emosional, dan fisik seseorang dalam merespons kegiatan yang dilakukan serta memberikan dukungan untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Dalam konteks ini, berbagai bentuk partisipasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat dapat diidentifikasi, antara lain: 1. Menjadi anggota dalam kelompok-kelompok masyarakat. 2. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang baik. 4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat. 5. Menggunakan hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya. [Id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi).

Dari beberapa bentuk partisipasi yang telah disebutkan, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata, seperti kontribusi uang, harta benda,

tenaga kerja, dan keterampilan. Jenis partisipasi ini terlihat secara materiil dan dapat diukur secara konkret. 2. Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata atau abstrak. Contohnya, partisipasi dalam memberikan gagasan, partisipasi dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, serta partisipasi melalui perwakilan. Jenis partisipasi ini lebih bersifat immateriil dan tidak dapat diukur secara langsung, namun memiliki dampak penting dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Partisipasi uang merupakan bentuk partisipasi yang bertujuan untuk mendukung dan memperlancar usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi. Dalam bentuk ini, individu atau kelompok masyarakat memberikan kontribusi finansial yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan atau program yang menguntungkan masyarakat tersebut. Partisipasi harta benda adalah bentuk partisipasi dimana individu atau kelompok masyarakat menyumbangkan harta benda sebagai bentuk dukungan dalam pembangunan. Harta benda yang disumbangkan dapat berupa alat-alat kerja, peralatan, atau sumber daya lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi tenaga adalah bentuk partisipasi dimana individu atau kelompok masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga kerja untuk melaksanakan usaha-usaha yang membantu keberhasilan suatu

kegiatan. Partisipasi ini melibatkan upaya fisik dan kerja keras dari masyarakat untuk mendukung dan menjalankan berbagai program pembangunan.

Partisipasi keterampilan, di sisi lain, melibatkan pemberian dorongan melalui keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan, dengan tujuan memungkinkan mereka untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

Partisipasi merupakan hasil pemikiran yang berkontribusi dalam bentuk sumbangan gagasan, pendapat, atau pemikiran konstruktif. Tujuan dari partisipasi tersebut adalah untuk membantu menyusun dan memperlancar pelaksanaan kegiatan serta mewujudkannya. Contohnya, partisipasi dapat terwujud dalam bentuk arisan, menghadiri acara duka, atau memberikan sumbangan perhatian atau tanda kedekatan sebagai motivasi bagi orang lain untuk ikut berpartisipasi. Dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan bersama, terdapat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan partisipasi perwakilan dilakukan dengan memberikan mandat atau kepercayaan kepada wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

2.2.3 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi memiliki kontribusi penting dalam kesuksesan suatu organisasi, yang antara lain adalah: a. Mengutamakan keputusan yang tepat: Partisipasi memungkinkan adanya

sumbangan beragam dan positif, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat. b. Komunikasi dua arah: Partisipasi memastikan komunikasi yang berjalan dua arah, sehingga baik atasan maupun bawahan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pemikiran mereka. c. Mendorong pemikiran kreatif: Partisipasi merangsang kemampuan berpikir kreatif untuk mencapai kepentingan bersama. d. Membangun tanggung jawab: Partisipasi melatih masyarakat untuk bertanggung jawab dan mendorong mereka untuk membangun kepentingan bersama. e. Mengikuti perubahan: Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

2.2.4 Definisi Pembangunan

Pembangunan memiliki fokus pada perubahan yang terjadi di berbagai bidang guna mencapai perbaikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Pembangunan desa dilakukan dengan tujuan mengurangi ketergantungan, meningkatkan kemandirian, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, agar pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, perlu ditingkatkan penyelenggaraan administrasi desa, karena kelancaran administrasi desa akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan.

Hakekat pembangunan adalah upaya pembangunan manusia Indonesia secara utuh, serta pembangunan untuk segenap

masyarakat Indonesia. Pembangunan ini mencakup kemajuan dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan, serta hal-hal lainnya. Selain itu, pembangunan juga melibatkan aspek batin, seperti pendidikan, rasa aman, keadilan, dan kesehatan. Pembangunan yang berkelanjutan mencakup seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam peningkatan kualitas hidup yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial.. Emil Samil (1986:3).

Dalam proses pembangunan, keterpaduan, keserasian, dan kelarasan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan, dengan dukungan dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), pemodal, dan teknologi. Ketiga komponen ini harus ada dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Perlu diingat bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pembangunan nasional, tujuan pembangunan harus memperhatikan hal-hal berikut: 1. Menguntungkan masyarakat: Pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. 2. Pemahaman masyarakat: Masyarakat harus memahami maksud dari pembangunan yang dilakukan. 3. Partisipasi masyarakat: Masyarakat harus terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Pelaksanaan yang sesuai:

Pembangunan harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Tujuan yang diharapkan dari pembangunan adalah untuk menetapkan dasar pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat adil dan makmur dapat terwujud secara merata, baik dari segi materiil maupun spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat daerah, yang didukung oleh pencapaian pembangunan desa.

Pembangunan yang berhasil bukanlah hasil kebetulan semata, tetapi merupakan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, sadar, dan terencana. Dalam konteks ini, pembangunan memiliki orientasi yang ditujukan pada pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.2.5 Defenisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 butir 5 menjelaskan “ Desa atau yang disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat semur hidup dan perkembangan masyarakat sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia dalam peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 2 menjelaskan Pemerintah Desa merupakan

penyelenggara dalam urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Sehingga yang menjadi unsur penyelenggara pemerintah yaitu; Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 121 menjelaskan yang menjadi pelaksana pembangunan desa adalah: 1. Kepala Desa mengoordinasikan program pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa. 2. Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. 3. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. 4. Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa. 5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa

2.2.6 Definisi Pembangunan Desa

Sejak berabad-abad yang lalu, umumnya desa-desa di Indonesia terbentuk sebagai desa nelayan atau desa petani. Oleh karena itu, desa dapat didefinisikan sebagai satu wilayah yang memiliki status hukum dan telah ada selama beberapa generasi,

umumnya memiliki ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial antara penduduknya. Penduduk desa tinggal dan menetap di daerah tertentu, memiliki adat istiadat yang menjadi dasar hukum, dan dipimpin oleh seorang kepala desa atau pemimpin lainnya sesuai dengan tradisi setempat. Kehidupan penduduk desa umumnya bergantung pada usaha pertanian atau nelayan, yang kadang-kadang diimbangi dengan usaha kerajinan tangan dan perdagangan kecil. B.N. Marbun (1988:9).

Manusia merupakan fokus utama dari setiap upaya pembangunan, dan yang dibangun adalah kemampuan dan potensi manusia sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan, yang merupakan esensi dari pembangunan itu sendiri. Usaha pembangunan berasal dari masyarakat, dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah, dan harus terus-menerus dibina secara sistematis dan terarah. Pembangunan masyarakat di tingkat pemerintahan yang paling rendah, seperti desa, merupakan bagian penting dari upaya pembangunan negara secara keseluruhan (I. Nyoman Beratha, *Ibid*, hal. 72).

Desa telah diberikan peluang dan kesempatan untuk memberdayakan masyarakat desa serta desa seperti yang dijelaskan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan keputusan dalam Negeri No.64 Tahun 1999. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom (desa otonom) sebagai otonom yang asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan

pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program - program kinerja dari berbagai instansi dan pemerintah.

2.2.7 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat secara umum dapat dipahami meliputi hal-hal berikut: 1. Minat masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Mendorong masyarakat desa untuk aktif dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembangunan, termasuk pembangunan politik. 3. Membentuk kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. 4. Mengantisipasi pembentukan opini yang tidak sesuai dengan proses demokrasi. 5. Mewakili gagasan, pendapat, dan pemahaman dalam berbagai kebijakan dan kepentingan. 6. Mencerminkan rasa cinta terhadap hal-hal yang diinginkan. 7. Menunjukkan kemampuan seseorang dalam mewujudkan diri dan mencapai prestasi. 8. Memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan perlu dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, yang mencerminkan potensi yang ada di desa tersebut. Pembangunan desa juga harus menjadi titik temu antara program-program yang berasal dari tingkat desa dengan program-program yang berasal dari tingkat nasional.

Robinson Tarigan M.R.P (2005: 4) menyebut Perencanaan merupakan proses dalam memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan untuk menggambarkan dan merumuskan program-program yang perlu dilaksanakan agar mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks pembangunan desa, perencanaan yang matang harus melibatkan pengidentifikasian dan pemanfaatan potensi yang ada di desa tersebut. Pembangunan desa perlu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang tersebut, yang mencakup potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

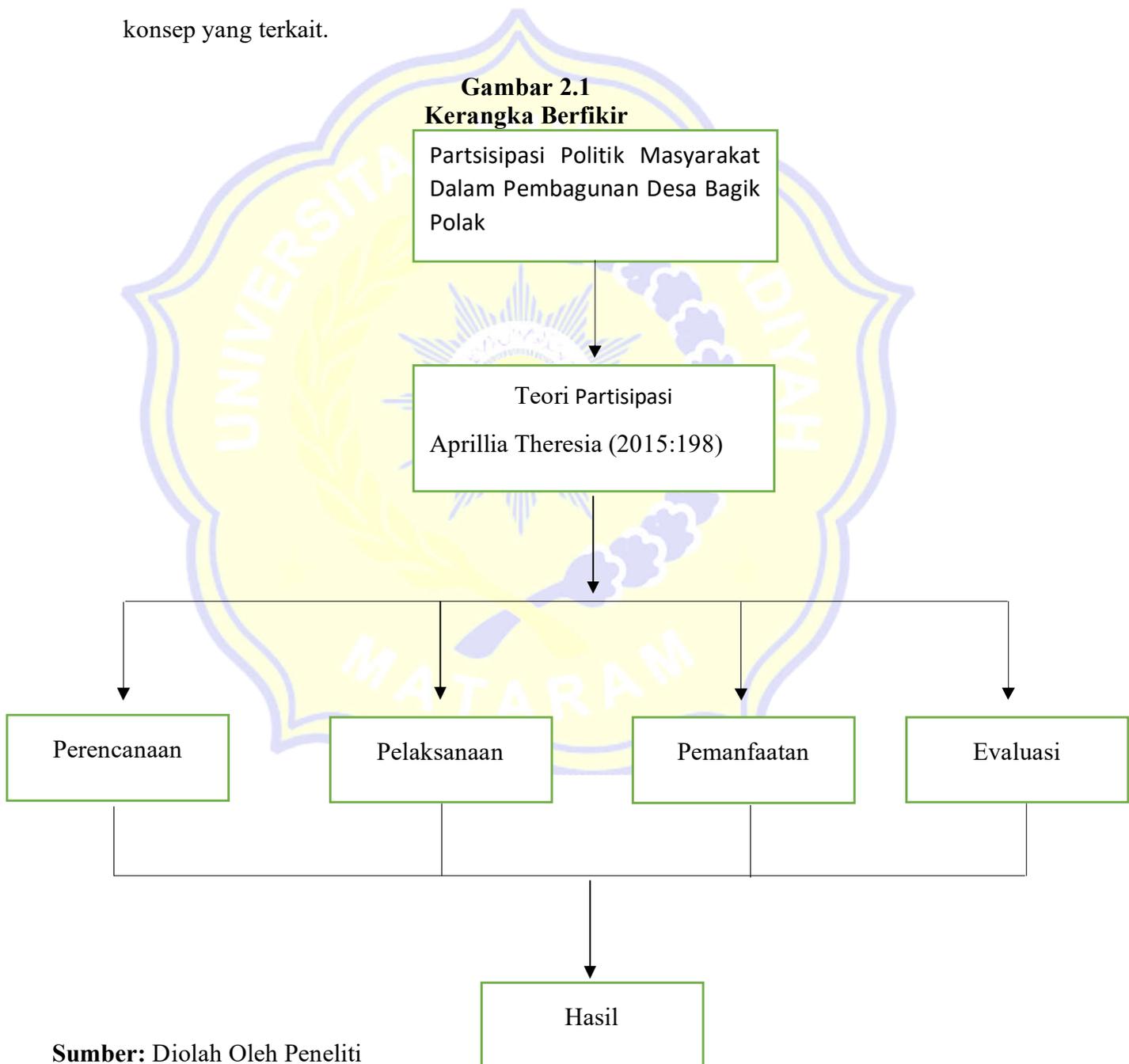
Mudrajad Kuncoro, Ph.D (2004: 58) memiliki pandangan bahwasanya Terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul dalam implementasi perencanaan daerah, serta permasalahan lain yang sering terjadi di lapangan, antara lain: 1. Perencanaan pembangunan nasional (Propenas) dan perencanaan pembangunan daerah (Propeda) disusun dalam periode lima tahunan, yang membuatnya tidak berkelanjutan secara kontinu. Propeda juga sering tidak menjelaskan manfaat dan hasil yang diharapkan, serta tidak terhubung dengan alokasi anggaran. Secara umum, perencanaan ini diartikan sebagai program-program pembangunan. 2. Belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana dan kapan perencanaan dapat terintegrasi dengan baik antara berbagai sektor dan level pemerintahan. 3. Terdapat kesenjangan yang besar dalam perhitungan kemampuan finansial saat perencanaan dilakukan

di lapangan. Hal ini dapat berdampak pada ketidakseimbangan antara rencana dan alokasi sumber daya yang tersedia. 4. Perencanaan sering kali terfokus pada anggaran dan proyek pembangunan, daripada melihat anggaran secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek penting lainnya, seperti pemeliharaan infrastruktur yang ada.



2.3 Kerangka Berpikir

sugiyo(2010: 60) berpendapat bahwa Kerangka berpikir merupakan suatu konsep konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori-teori yang terkait dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berpikir yang digambarkan dalam gambar di bawah ini untuk mengorganisir dan menjelaskan hubungan antara berbagai konsep yang terkait.



Sumber: Diolah Oleh Peneliti

2.4 Defenisi Konseptual

Konseptual artinya pemaknaan dan konsep yang digunakan, supaya memudahkan peneliti dalam menggunakan konsep tersebut di lapangan (singarimbun dan efendi, 2001:121 Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembangunan Desa merupakan konseptual dalam penelitian ini.

2.4.1 Masyarakat

Menurut pendapat Aprillia Theresia (2015:198), partisipasi merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok anggota masyarakat dalam seluruh proses kegiatan terkait. Hal ini meliputi pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (termasuk pemantauan, evaluasi, dan pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil yang telah dicapai melalui kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, partisipasi mengimplikasikan adanya keterlibatan aktif dan kontribusi dari individu atau kelompok dalam semua tahapan proses kegiatan yang berhubungan.

2.4.2 Bentuk-bentuk Partisipasi

Kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap masyarakat dapat beragam, antara lain: 1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat. 2. Terlibat dalam setiap kegiatan yang ada. 3. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang positif. 4. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat. 5. Memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai melalui kegiatan masyarakat tersebut.. [Id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi).

2.4.3 Manfaat partisipasi masyarakat

Terwujudnya keberhasilan organisasi dapat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam beberapa hal, yaitu: a. Mengutamakan upaya untuk mencapai keputusan yang benar. b. Menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang efektif antara atasan dan bawahan. c. Mendorong perkembangan kemampuan berpikir kreatif pada masyarakat. d. Melatih masyarakat agar memiliki tanggung jawab dan mempromosikan pembangunan kepentingan bersama. e. Memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi.

2.4.4 Definisi Pembangunan

Pembangunan memiliki fokus utama pada transformasi yang melibatkan berbagai bidang dengan tujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Hakekat dari pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh, serta pembangunan keseluruhan masyarakat Indonesia.. Emil Samil (1986:3).

2.4.5 Definisi Desa

Berdasarkan UU No.06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 butir 5 menjelaskan “ desa atau yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat seumur hidup dalam perkembangan masyarakat sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.4.6 Definisi Pembangunan Desa

Desa merupakan sebuah entitas hukum yang terbentuk sejak beberapa generasi yang umumnya ditandai dengan adanya hubungan kekeluargaan atau ikatan sosial antara anggota-anggotanya.

2.5.7 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, yang mencerminkan potensi yang ada di desa, dan menjadi titik temu antara program-program di tingkat desa dan tingkat nasional.

2.5 Defenisi Oprasional

Tabel 2.2 Defenisi Oprasional

No	Variabel	Indikator	Sub indikator
1.	Partisipasi Masyarakat	1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (perencanaan) . 2. Partisipasi dalam pelaksanaan. 3. Partisipasi dalam pemanfaatan. 4. Partisipasi dalam evaluasi	1. Kehadiran atau keterlibatan masyarakat 2. Memberikan usulan program 3. Memberikan saran dan kritikan.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk menginvestigasi kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang permasalahan yang sedang dibahas, serta melakukan tafsiran dan penjelasan data secara sistematis, guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dalam kaitannya dengan penelitian kami ini yaitu “Analisis Partisipasi Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”.

Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan melukiskan dengan rinci apa yang sedang diteliti, serta berupaya memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang menjadi inti permasalahan yang sedang dikaji. (Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur (2014: 25))

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kantor Kepala Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Kenapa peneliti memilih lokasi atau wilayah ini menjadi objek penelitian karena di Desa Bagik Polak masih terdapat banyak kelompok masyarakat yang belum memahami makna penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang masih menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan desa. Oleh karena itu, objek penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.3 Sumber Data

Menurut sugiyono (2015) Sumber data peneliti disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, pemilihan sampel dan sumber data ditekankan, dengan memprioritaskan perspektif emik. Ini berarti penelitian memberikan kepentingan utama pada pandangan informan, yaitu bagaimana mereka menafsirkan dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Peneliti tidak memaksa atau memengaruhi informan untuk menghasilkan data sesuai dengan keinginan peneliti.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan observasi langsung pada lokasi dan tempat

penelitian di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan mengamati informan serta mewawancarai masyarakat di Desa Bagik Polak . Berikut adalah data responden yang nantinya akan diharapkan dapat memberikan data yang diperlukan peneliti, antara lain:

Table 2.3 Daftar Nama informan

No.	Informan	Jumlah Informan
1.	Kepada Desa Bagi polak	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	BPD	1 orang
4.	Masyarakat Desa	10 orang
5.	Karang Taruna Desa	2 orang
6.	Jumlah	15 orang

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

3.3.2 Data Skunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya, termasuk dokumen resmi dari instansi. Selain itu, data sekunder dapat berupa majalah, bulletin, lampiran-lampiran, hasil survei, dan lain sebagainya. Tujuan penggunaan data sekunder ini adalah untuk memperkuat temuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara.

3.4 Teknik Penentuan Responden

Dalam penelitian ini, digunakan teknik penentuan responden menggunakan *Teknik purposive sampling*. *Teknik purposive sampling*

adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria yang relevan dari sampel yang diinginkan. Teknik pengambilan *purposive sampling* pertama yaitu perangkat desa yang berjumlah 3 orang terdiri dari: Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Sekertaris BPD. *purposive sampling* pengukur kedua yaitu toko masyarakat yang berjumlah 12 orang terdiri dari 1 Orang Toko Agama, 2 Orang Toko Masyarakat, 2 serta Kepala Dusun yang berjumlah 7 orang. Dengan demikian jumlah *purposive sampling* 15 orang responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Teknik Observasi

Imam Gunawan (2016:143) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara akurat dan mencatat fenomena yang akan diteliti..

Teknik Dalam hal ini, peneliti akan melakukan pengamatan yang mendalam dan akurat untuk mendapatkan pemahaman yang detail tentang fenomena yang sedang diteliti yaitu “Desa BagiK polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”

3.5.2 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan pendapat melalui proses tanya jawab, dengan tujuan untuk memperoleh informasi baru dan mengembangkan informasi yang telah ada. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur yang lebih fleksibel, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang ketat. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang sedang diteliti.

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Imam Gunawan (2016:178). Dokumen merupakan sumber data yang melengkapi data penelitian, termasuk sumber tertulis, gambar, dan karya lainnya yang memberikan informasi penting bagi proses penelitian. Metode ini memiliki manfaat dalam memperkuat data setelah penelitian dilakukan. Namun, perlu dicatat bahwa ketika menggunakan dokumen sebagai sumber data, peneliti tidak dapat memanipulasi dokumentasi hasil penelitian tersebut setelah ditemukan, sehingga tetap mempertahankan integritas dan keaslian data. Dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah foto, rekaman dan data yang berkaitan dengan Desa Bagik polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”

3.6 Teknik Analisis Data

Adapun menurut sugiyono (2018:224) bahwa Analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan

pengorganisasian data ke dalam kategori yang relevan, mengelompokkan data ke dalam unit-unit yang sesuai, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola yang muncul, serta memilih elemen-elemen yang penting dan mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai partisipasi politik masyarakat terhadap pembangunan desa. Analisis dilakukan dengan mengurai atau mengklarifikasi data yang ada untuk dapat mencapai kesimpulan yang relevan.

3.6.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang cukup besar, oleh karena itu penting untuk mencatatnya dengan teliti dan rinci. Dalam hal ini, perlu segera dilakukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data mengimplikasikan rangkuman, pemilihan informasi inti, fokus pada hal-hal yang penting, dan penemuan tema dan pola yang ada. Dengan melakukan reduksi data, gambaran yang lebih jelas dapat dihasilkan, serta memudahkan peneliti dalam pengumpulan data lanjutan dan pencarian data jika diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan

melalui uraian singkat, pemisahan data menjadi bagian-bagian, menunjukkan hubungan antara kategori yang ada, dan hal-hal serupa lainnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1998) menyatakan Metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif. Penyajian data melalui teks naratif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan konteks, kompleksitas, dan makna dari temuan kualitatif dengan lebih mendalam.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan baru yang sebelumnya belum diketahui. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran yang mendalam mengenai objek penelitian yang sebelumnya belum begitu jelas atau terdefinisi dengan baik. Selain itu, kesimpulan juga dapat mengungkap hubungan kasual atau interaktif antara variabel-variabel yang diteliti, menghasilkan hipotesis baru, atau bahkan mengembangkan teori yang lebih luas (Sugiyono, 2008).

3.7 Validasi Data

Validitas Data adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Validitas data dapat dikatakan tinggi jika instrumen tersebut secara akurat merefleksikan konstruk atau variabel yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, digunakan validitas isi sebagai metode pengukuran validitas. Validitas isi merupakan jenis validitas permukaan (face validity) yang mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran mencakup keseluruhan isi konstruk yang ingin diukur. Meskipun masih melibatkan unsur subjektivitas,

penilaian validitas isi lebih dapat diterima karena tetap berdasarkan kerangka teori yang telah tersedia.

3.8 Uji Kredibilitas

Dalam pengujian kredibilitas data terdapat macam-macam cara pengujian. Menurut Sugiyono (2012:270) menegaskan sebagai berikut: Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya adalah memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan teman sejawat, dan menganalisis kasus negatif.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa percobaan uji kredibilitas diantaranya:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam konteks ini mengacu pada kegiatan di mana peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang sebelumnya telah ditemui, serta sumber data yang baru. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat hubungan yang lebih akrab antara peneliti dan narasumber, menciptakan keadaan di mana tidak ada lagi jarak antara keduanya, meningkatkan tingkat keterbukaan, dan saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Selain itu, Sugiyono (2007) menambahkan bahwa Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memverifikasi keabsahan data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini. Dalam hal data tersebut tidak terbukti benar, peneliti akan melakukan

pengamatan yang lebih luas dan mendalam guna memperoleh data yang dapat dipastikan kebenarannya. Untuk membuktikan bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, disarankan agar dilampirkan surat keterangan perpanjangan dalam laporan penelitian. Surat keterangan tersebut dapat berfungsi sebagai bukti konkret bahwa penelitian telah melibatkan tahapan perpanjangan pengamatan sebagai langkah uji kredibilitas data.

2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

Meningkatkan ketekunan melibatkan pengamatan yang lebih cermat dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, keakuratan data dan urutan peristiwa dapat tercatat dengan pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti dapat melakukan verifikasi terhadap kebenaran data yang telah ditemukan. Peneliti dapat memberikan deskripsi yang akurat dan sistematis mengenai apa yang diamati. Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti disarankan untuk membaca berbagai referensi buku, penelitian, dan dokumentasi terkait dengan temuan yang sedang diteliti. Dengan membaca materi tersebut, pengetahuan peneliti akan semakin meluas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang telah ditemukan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini merujuk pada verifikasi data melalui berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan dilakukan pada waktu yang berbeda. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang sama dari

sumber yang berbeda, menggunakan teknik yang berbeda pula. Sementara itu, triangulasi pengumpulan data melibatkan penggunaan metode seperti wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono (2007) memaparkan triangulasi juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan hasil penelitian oleh tim peneliti lain yang bertugas mengumpulkan data. Dalam konteks ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan dan hasil penelitian yang diperoleh oleh tim peneliti yang berbeda, yang telah melaksanakan pengumpulan data secara terpisah. Hal ini memberikan kepercayaan yang lebih besar terhadap hasil penelitian karena data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan telah melibatkan lebih dari satu tim peneliti, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda dan lebih menyeluruh dalam menguji kredibilitas.

